

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 51/Menhut-II/2011
TANGGAL : 30 Juni 2011

KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KEHUTANAN

BAB I PENDAHULUAN

A. BENTUK DAN SUSUNAN

1. Klasifikasi Arsip Kementerian Kehutanannya disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi/kegiatan Kementerian Kehutanannya.
2. Pola Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dan dibagi menjadi 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) perincian dasar. Perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga merupakan pola dasar yang berfungsi sebagai acuan dalam menentukan kode masalah yang tercantum dalam Pola Klasifikasi.
3. Untuk membedakan rincian pertama, kedua dan ketiga dipergunakan kode huruf dan angka. Huruf adalah kode rincian pertama (masalah primer), angka pertama merupakan kode rincian kedua (masalah sekunder) dan angka kedua merupakan kode rincian ketiga (masalah tersier).

B. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami Pola Klasifikasi harus memahami rincian pertama, kedua dan ketiga serta memahami hubungan antara masalah dengan sub masalah dan sub-sub masalahnya.
2. Tiap kode sub masalah dan sub-sub masalah merupakan rincian dari pokok masalah.

Contoh :

OTL.0.3

OTL : Kode rincian pertama/masalah primer ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA

0 : Kode rincian kedua/masalah sekunder dari ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA yaitu ORGANISASI

3 : Kode rincian ketiga/masalah tertier dari ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA yaitu Unit Pelaksana Teknis (BALAI BESAR/BALAI).

Dari contoh di atas dapat diartikan bahwa kode OTL.0.3 adalah naskah dinas yang berkenaan dengan usul pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan organisasi Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai) Kementerian Kehutanannya.

/3. Untuk ...

3. Untuk dapat menentukan Kode Klasifikasi suatu arsip secara tepat harus dipahami masalah yang terkandung dan dari sudut pandang mana masalah itu disajikan.
4. Arsip yang mempunyai lebih dari satu masalah harus ditetapkan masalah yang lebih utama dikaitkan dengan tugas dan fungsi unit kerja yang mendayagunakan arsip.
5. Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Kehutanan terdiri dari 18 (delapan belas) pokok masalah, yang terdiri dari kegiatan Fasilitatif dan Substantif yang mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan baik di Pusat maupun di Daerah, yaitu :

KEGIATAN FASILITATIF (11 pokok masalah)

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | dengan kode OTL |
| 2) KEPEGAWAIAN | dengan kode PEG |
| 3) KESEKRETARIATAN | dengan kode SET |
| 4) KEUANGAN | dengan kode KEU |
| 5) PERLENGKAPAN | dengan kode KAP |
| 6) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEHUTANAN | dengan kode DIK |
| 7) HUKUM | dengan kode KUM |
| 8) HUBUNGAN MASYARAKAT | dengan kode HMS |
| 9) KERJASAMA LUAR NEGERI | dengan kode KLN |
| 10) PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN | dengan kode WAS |
| 11) PERENCANAAN | dengan kode REN |

KEGIATAN SUBSTANTIF (7 pokok masalah)

- | | |
|---|-----------------|
| 1) PENYULUHAN | dengan kode LUH |
| 2) PLANOLOGI KEHUTANAN | dengan kode PLA |
| 3) BINA USAHA KEHUTANAN | dengan kode BUK |
| 4) STANDARDISASI | dengan kode STD |
| 5) PERLINDUNGAN HUTAN DAN
KONSERVASI ALAM | dengan kode PKA |
| 6) BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL | dengan kode DAS |
| 7) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | dengan kode LIT |

/BAB II ...

BAB II

POLA KLASIFIKASI ARSIP

KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEGIATAN FASILITATIF

OTL ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

OTL.0 ORGANISASI

- OTL.0.0 Pemerintah Republik Indonesia
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Republik Indonesia.
- OTL.0.1 Kementerian Kehutanan
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan organisasi Kementerian Kehutanan.
- OTL.0.2 Kantor Wilayah
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan.
- OTL.0.3 Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai/SMKK)
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan organisasi Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai/SMKK) Kementerian Kehutanan.
- OTL.0.4 Dinas Kehutanan
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan organisasi Dinas Kehutanan Tingkat I dan Tingkat II.
- OTL.0.5 Kesatuan Pengelolaan Hutan
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)/Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)/Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

/OTL.0.6 Badan ...

- OTL.0.6 Badan Usaha Milik Negara
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan organisasi Badan Usaha Milik Negara lingkup Kementerian Kehutanan baik di Pusat maupun di Daerah.
- OTL.0.7 Asosiasi Kehutanan
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan organisasi/asosiasi di bidang kehutanan.
- OTL.1 PERUMUSAN JABATAN
- OTL.1.0 Analisa Jabatan
Naskah dinas yang berkenaan dengan analisa jabatan sampai dengan penetapannya.
- OTL.1.1 Uraian Jabatan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan uraian jabatan dan uraian tugas sampai dengan penetapannya.
- OTL.1.2 Klasifikasi Jabatan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan klasifikasi jabatan sampai dengan penetapannya.
- OTL.1.3 Evaluasi Jabatan
Naskah dinas yang berkenaan dengan evaluasi jabatan.
- OTL.1.4 Evaluasi Kinerja
Naskah dinas yang berkenaan dengan evaluasi kinerja.
- OTL.1.5 Sistem Karier
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan sistem karier sampai dengan penetapannya.
- OTL.2 TATA LAKSANA
- OTL.2.0 Perencanaan
Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi lingkup Kementerian Kehutanan baik Pusat maupun di Daerah.
- /OTL.2.1 Pengorganisasian ...

- OTL.2.1 Pengorganisasian
Naskah dinas yang berkenaan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- OTL.2.2 Penyusunan Sumber Daya Manusia
Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana penyusunan sumber daya manusia sampai dengan penetapannya.
- OTL.2.3 Pengarahan
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengarahan pimpinan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- OTL.2.4 Koordinasi
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengumpulan, penganalisaan dan penetapan tata hubungan kerja.
- OTL.2.5 Laporan
Naskah dinas yang berkenaan dengan laporan kegiatan organisasi lingkup Kementerian Kehutanan.
- OTL.2.6 Penganggaran
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengumpulan, penganalisaan, penganggaran dan penetapan sarana dan prasarana kerja.
- OTL.2.7 Pengendalian
Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana penyusunan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sampai dengan penetapannya.
- OTL.2.8 Evaluasi
Naskah dinas yang berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi lingkup Kementerian Kehutanan.

PEG KEPEGAWAIAN

PEG.0 FORMASI PEGAWAI

- PEG.0.0 Formasi Pegawai
Naskah dinas yang berkenaan dengan usulan kebutuhan pegawai dari Unit Kerja, usulan permintaan formasi kepada Menpan dan Kepala BKN, persetujuan Menpan, penetapan formasi, sampai dengan penetapan formasi khusus.

/PEG.0.1 Pengadaan ...

- PEG.0.1 Pengadaan Pegawai
Naskah dinas yang berkenaan dengan proses penerimaan pegawai antara lain pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta tes, pelaksanaan ujian tertulis, wawancara, penetapan pengumuman kelulusan, berkas lamaran yang tidak diterima, nota usul pengangkatan, Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

PEG.1 PEMBINAAN KARIER PEGAWAI

- PEG.1.0 Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Tugas Belajar/Ijin Belajar Pegawai.
Naskah dinas yang berkenaan diklat/kursus/magang/ ujian dinas /tugas belajar/ijin belajar pegawai, laporan kegiatan dan penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL).
- PEG.1.1 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Naskah dinas yang berkenaan dengan usul dan penetapan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- PEG.1.2 Penetapan Angka Kredit
Naskah dinas yang berkenaan dengan usul, penilaian dan penetapan angka kredit.
- PEG.1.3 Disiplin Pegawai
Naskah dinas yang berkenaan dengan disiplin pegawai antara lain daftar hadir, rekapitulasi daftar hadir, penggunaan seragam dinas, catatan pelanggaran.
- PEG.1.4 Hukuman Disiplin Pegawai
Naskah dinas yang berkenaan dengan hukuman disiplin pegawai meliputi teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan/penurunan gaji/pangkat/ golongan, pembebasan jabatan.
- PEG.1.5 Penyelesaian Keberatan Pegawai
Naskah dinas yang berkenaan dengan usul dan penetapan penyelesaian keberatan pegawai.
- PEG.1.6 Pembinaan Mental
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembinaan mental/spiritual pegawai (termasuk ceramah keagamaan, sarana peribadatan).

/PEG.2 MUTASI ...

PEG.2 MUTASI PEGAWAI

PEG.2.0 Alih Tugas

Naskah dinas yang berkenaan dengan usulan, Nota Persetujuan/Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara dan penetapan alih tugas pegawai yang meliputi alih tugas, diperbantukan, ditugaskan, dipekerjakan, dan alih status kepegawaian.

PEG.2.1 Mutasi Keluarga

Naskah dinas yang berkenaan dengan usulan dan penetapan penyesuaian tunjangan pegawai meliputi Surat Ijin Pernikahan/Perceraian, Surat Penolakan Ijin Pernikahan/perceraian, Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran Anak, Surat Keterangan Meninggal Dunia.

PEG.2.2 Kenaikan Gaji Berkala

Naskah dinas yang berkenaan dengan kenaikan gaji berkala.

PEG.2.3 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan

Naskah dinas yang berkenaan dengan usulan dan penetapan kenaikan pangkat/golongan/jabatan.

PEG.2.4 Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Naskah dinas yang berkenaan dengan usulan sampai dengan penetapan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

PEG.2.5 Peninjauan Masa Kerja

Naskah dinas yang berkenaan dengan usul peninjauan masa kerja sampai dengan penetapannya.

PEG.2.6 Pertimbangan Jabatan dan Pangkat

Naskah dinas yang berkenaan dengan proses pertimbangan jabatan dan pangkat.

PEG.3 ADMINISTRASI PEGAWAI

PEG.3.0 Surat Perintah Tugas

Naskah dinas yang berkenaan dengan Surat Perintah Tugas.

PEG.3.1 Cuti Besar

Naskah dinas yang berkenaan dengan usulan sampai dengan penetapan cuti besar.

/PEG.3.2 Cuti Sakit ...

- PEG.3.2 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan
Naskah dinas yang berkenaan dengan usulan sampai dengan penetapan cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan.
- PEG.3.3 Cuti Alasan Penting
Naskah dinas yang berkenaan dengan usulan sampai dengan penetapan cuti alasan penting.
- PEG.3.4 Cuti Diluar Tanggungan Negara
Naskah dinas yang berkenaan dengan usul sampai dengan penetapan cuti diluar tanggungan negara.
- PEG.3.5 Dokumentasi Identitas Pegawai
Naskah dinas yang berkenaan dengan identitas pegawai (pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami dan Bukti Diri/NIP, Taspen, Keanggotaan Organisasi Profesi Kedinasan, Keanggotaan Parpol/Ormas/LSM, Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P), Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4).
- PEG.3.6 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Berkas Kepegawaian
Naskah dinas yang berkenaan dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan berkas kepegawaian.
- PEG.4 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
- PEG.4.0 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
Naskah dinas yang berkenaan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai.
- PEG.4.1 Asuransi Kesehatan
Naskah dinas yang berkenaan dengan layanan asuransi kesehatan.
- PEG.4.2 Tabungan Perumahan
Naskah dinas yang berkenaan dengan layanan tabungan perumahan.
- PEG.4.3 Bantuan Sosial
Naskah dinas yang berkenaan dengan layanan bantuan sosial.

/PEG.4.4 Rekreasi ...

- PEG.4.4 Rekreasi, Kesenian dan Olahraga
Naskah dinas yang berkenaan dengan layanan rekreasi, kesenian, dan olahraga.
- PEG.4.5 Layanan Beras
Naskah dinas yang berkenaan dengan layanan beras.
- PEG.4.6 Pengurusan Jenazah
Naskah dinas yang berkenaan dengan layanan pengurusan jenazah.
- PEG.4.7 Antar Jemput
Naskah dinas yang berkenaan dengan antar jemput pegawai (termasuk penyediaan kendaraan).
- PEG.4.8 Pakaian Dinas
Naskah dinas yang berkenaan dengan pakaian dinas.
- PEG.4.9 KORPRI, Dharma Wanita, Pramuka Saka Wana Bhakti, Koperasi, Yayasan
Naskah dinas yang berkenaan dengan layanan KORPRI, Dharma Wanita, Pramuka Saka Wana Bhakti, Koperasi, Yayasan.
- PEG. 5 PEMBERHENTIAN PEGAWAI
- PEG.5.0 Atas Permintaan Sendiri
Naskah Dinas yang berkenaan dengan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkan Surat Keputusan.
- PEG.5.1 Tidak Atas Permintaan Sendiri
Naskah dinas yang berkenaan dengan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkan Surat Keputusan.
- PEG.5.2 Meninggal Dunia
Naskah dinas yang berkenaan dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia mulai dari pengajuan/pemberitahuan sampai dengan dikeluarkan Surat Keputusan.

/PEG.5.3 Pemberhentian ...

PEG.5.3 Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/ Duda dari PNS yang tewas.
Naskah dinas yang berkenaan dengan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda dari PNS yang tewas.

PEG.6 PERSELISIHAN SENGKETA KEPEGAWAIAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan perselisihan sengketa kepegawaian mulai dari proses pengajuan sampai dengan penetapan.

PEG.7 PENGHARGAAN

PEG.7.0 Penghargaan Kementerian Kehutanan
Naskah dinas yang berkenaan dengan pemberian penghargaan, tanda jasa, piagam, dan penghargaan lainnya yang berasal dari Kementerian Kehutanan.

PEG.7.1 Penghargaan Nasional
Naskah dinas yang berkenaan dengan pemberian penghargaan yang berasal dari luar Kementerian Kehutanan.

PEG.7.2 Penghargaan Internasional
Naskah dinas yang berkenaan dengan pemberian penghargaan internasional.

PEG.8 BERKAS PERSEORANGAN PNS

Naskah dinas yang berkenaan dengan berkas perseorangan PNS yang meliputi:

- Lamaran
- Nota Persetujuan Kepala BKN
- SK. Pengangkatan CPNS
- Hasil Pengujian Kesehatan
- SK. Pengangkatan PNS
- SK. Kenaikan Pangkat
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan
- SK. Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional.
- SK. Perpindahan Wilayah Kerja
- SK. Perpindahan Antar Instansi
- SK. Peninjauan Masa Kerja
- Surat Keterangan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)

/- Berita ...

- Berita Acara Pemeriksaan
- SK. Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin
- SK. Perbantuan Kepala Daerah Otonom/Instansi Lain
- SK. Penarikan Kembali dari Perbantuan
- SK. Pemberian Uang Tunggu
- SK. Pemberhentian sebagai PNS.
- SK. Pemberhentian Sementara
- SK. Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara
- SK. Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara
- Surat Keterangan Pernyataan PNS yang Hilang
- Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang
- SK. Penggantian Nama
- SK. Pensiun
- Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan
- Surat Ijin menjadi anggota Parpol/Ormas/LSM.
- Surat pencabutan ijin menjadi anggota Parpol/Golkar
- Surat Keterangan Meninggal dunia
- Surat Keterangan Mutasi Keluarga
- Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan
- Penetapan Angka Kredit (PAK)
- Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus
- Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
- Surat Tugas/Ijin Belajar Dalam/Luar Negeri
- Surat Ijin Bepergian ke Luar Negeri
- Kartu Induk Pegawai
- Ijasah/Sertifikat
- SK Penempatan/Penarikan Pegawai
- SK Pengangkatan Pada Jabatan Kedinasan Diluar Instansi
- SK Persetujuan/Penugasan Kembali Cuti diluar Tanggungan Negara

SET KESEKRETARIATAN

SET. 0 KERUMAHTANGGAAN

- SET.0.0 Pengamanan dan Ketertiban
Naskah dinas yang berkenaan dengan masalah pengamanan dan ketertiban kantor serta rumah dinas.

/SET.0.1 Pemeliharaan ...

- SET.0.1 Pemeliharaan Gedung dan Taman
Naskah dinas yang berkenaan dengan pertamanan/*landscaping*, penghijauan, perbaikan gedung, perbaikan rumah dinas/wisma, kebersihan gedung dan taman.
- SET.0.2 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, Televisi, Kabel dan Komputer
Naskah dinas yang berkenaan dengan perbaikan dan pemeliharaan jaringan listrik, air, telepon, televisi kabel dan komputer.
- SET.0.3 Perjalanan Dinas
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengurusan perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan.
- SET.0.4 Kendaraan Dinas dan Bus Antar Jemput
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengurusan surat-surat kendaraan dinas dan bus antar jemput, pemeliharaan, perbaikan, pengurusan dan masalah kendaraan.
- SET.0.5 Protokoler
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan protokoler antara lain : kunjungan kerja pimpinan, penerimaan tamu pimpinan, rapat pimpinan, penyelenggaraan upacara dan pelantikan, agenda pimpinan serta konsumsi dan akomodasi.
- SET.0.6 Penggunaan Fasilitas Kantor
Naskah dinas yang berkenaan dengan penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, wisma, rumah dinas, kendaraan, dan fasilitas kantor lainnya.
- SET. 1 KETATAUSAHAAN
- SET.1.0 Persuratan
Naskah dinas yang berkenaan dengan urusan surat menyurat yang terdiri dari: pemberitahuan pindah kantor, penambahan nomor telepon, alamat pejabat, spesimen tanda tangan pejabat, cap dinas, penomoran, pengiriman, ekspedisi, dan penyimpanan.
- /SET.1.1 Penggandaan ...

- SET.1.1 Penggandaan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penggandaan, antara lain : penyusunan desain, pencetakan, penjlidan, serta pendistribusian kalender dan agenda Kementerian Kehutanan.
- SET.1.2 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Pengelolaan Perpustakaan
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengelolaan karya cetak dan karya rekam serta pengelolaan perpustakaan.
- SET.2 KEARSIPAN
- SET.2.0 Sistem Kearsipan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan sampai dengan penetapan sistem kearsipan.
- SET.2.1 Pengelolaan Kearsipan
Naskah dinas yang berkenaan dengan ketatalaksanaan, pengolahan, penyimpanan, analisa nilai guna, pemindahan, penyerahan, pemusnahan, perawatan dan konservasi, pelacakan arsip, serta penyelamatan arsip vital.
- SET.2.2 Pengembangan Kearsipan
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.
- SET.2.3 Layanan Jasa Kearsipan
Naskah dinas yang berkenaan dengan layanan jasa kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.
- SET.2.4 Sosialisasi dan Pembinaan Kearsipan
Naskah dinas yang berkenaan dengan sosialisasi dan pembinaan kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.
- SET.2.5 Bimbingan dan Penyuluhan Kearsipan
Naskah dinas yang berkenaan dengan bimbingan dan penyuluhan kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.
- /SET.2.6 Supervisi ...

- SET.2.6 Supervisi dan Monitoring
Naskah dinas yang berkenaan dengan supervisi dan monitoring penyelenggaraan kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.

KEU KEUANGAN

KEU.0 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN)

- KEU.0.1 Penyusunan RAPBN
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan RAPBN terdiri dari :
- Materi penyusunan arah kebijakan umum, strategi, prioritas dan Renstra.
- Rencana Kerja Pemerintah.
- Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan RKA-K/L
- Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP)
- KEU.0.2 Penyampaian RAPBN kepada DPR
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyampaian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada DPR RI terdiri dari :
- Materi Penyampaian Nota Keuangan
- Materi Pembahasan RAPBN dari Kementerian Kehutanan
- Pembahasan RAPBN oleh Komisi DPR RI
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR RI
- Nota Jawaban DPR RI
- KEU. 0.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Naskah dinas yang berkenaan dengan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari :
- Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara
- Ketetapan Pagu Definitif
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kehutanan
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya

/- Ketentuan ...

- Ketentuan/Peraturan Yang Menyangkut Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran
- Target Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP

KEU.1 PELAKSANAAN ANGGARAN

KEU.1.0 Pendapatan

Naskah dinas yang berkenaan dengan Pendapatan Kementerian Kehutanan terdiri dari :

- Surat Setoran Pajak (SSP)
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
- Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)
- Bunga dan/atau Jasa Giro pada Bank
- Piutang Negara
- Pengelolaan Investasi
- Pengelolaan Barang Milik Negara

KEU.1.1 Belanja

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembelanjaan/ pengeluaran Kementerian Kehutanan terdiri dari :

- Dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi : Barang Pakai Habis, Barang Inventaris, Jasa
Beserta data pendukungnya antara lain :
Dokumen uang muka dan data pendukungnya, penagihan/*invoice*, kwitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta data pendukungnya (copy faktur pajak, nota kredit dll), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Barang, Surat Permintaan Pembayaran/SPP, Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya.
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan lampirannya SPP-GU, SPP DU/TU, ABT Rutin, SPP-LS.
- Pembukuan Anggaran meliputi Buku Kas Umum/BKU, Buku Kas Pembantu (BKP), Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran, Rekening Koran Bank.
- Daftar Gaji/kartu gaji

/- Penggunaan ...

- Penggunaan Dana Pemerintah RI untuk Kontribusi/iuran pada Badan atau Organisasi Internasional.
- Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah
- Hutang Negara
- Laporan Arus Kas meliputi : Berita Acara Pemeriksaan, Kas/Register Penutupan Kas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) termasuk Arsip Data Komputer (ADK), Laporan Pendapatan Negara, Laporan Keadaan Kredit Kas (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran.
- Data Rekening BUN

KEU.2 BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI

Naskah Dinas yang berkenaan dengan bantuan/pinjaman Kementerian Kehutanan dari Luar Negeri terdiri dari :

- Dokumen Permohonan Pinjaman Luar Negeri (*Blue Book*)
- Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (*Grey Book*)
- Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)*, dan sejenisnya.
- Dokumen *Loan Agreement* seperti : *Draft Agreement, Legal Opinion*, Surat Menyurat, Tender dsb.
- Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain : Usulan Luncuran Dana.
- Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN, lampirannya : *Reimbursement, Direct Payment/Transfer Payment, Special Commitment* atau *L/C Opening, Special Account/Imprest Fund*).
- Otorisasi Penarikan Dana (*Payment Advice*).
- Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPM beserta lampirannya antara lain : SPP, Kontrak, Berita Acara dan Data Pendukung Lainnya).
- *Replenishment* (Permintaan Penarikan Dana Dari Negara Donor) meliputi : *No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)*.
- *Staff Appraisal Report*
- *Report/Laporan* yang terdiri dari: *Progress Report, Monthly Report, Quarterly Report*.
- Laporan Hutang Negara: Laporan Pembayaran Hutang Negara, Laporan Posisi Hutang Negara.

/- Completion...

- *Completion Report/Annual Report.*
- Ketentuan/Peraturan Yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri.

KEU.3 PENGELOLA APBN/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN).

Naskah dinas yang berkenaan dengan Pengelola APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yaitu Keputusan Menteri tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Pengelola Barang, termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan.

KEU.4 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

Naskah dinas yang berkenaan dengan Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) :

- Manual Implementasi SAI.
- Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
- Daftar Transaksi (DT), Pengeluaran (PK), Penerimaan (PN), Dokumen Sumber (DS), Bukti Jurnal (BJ), Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Giro 5 atau 8 (Giro 5/8), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM Dalam Daftar Ringkasan Pengembalian Dan Potongan Dari Pengeluaran (SPDR).
- *Listing* (Daftar Rekaman Penerimaan) Buku Temuan dan Tindakan lain (SAI)
- Laporan Realisasi SAI
Laporan Keuangan Semester dan Tahunan terdiri dari :
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan BMN Semester dan Tahunan
- Laporan Realisasi Triwulan SAI dari Unit Akuntansi Wilayah (UAW) dan gabungan semua UAW/Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI).
- Laporan Semester/Tahunan.

KEU.5 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA.

Naskah dinas yang berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara terdiri dari :

/- Laporan ...

- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP).
- Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal.
- Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP), Tindak Lanjut/Tanggapan LHP.
- Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara : Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

KAP PERLENGKAPAN

KAP.0 ANALISA KEBUTUHAN

KAP.0.0 Data Kebutuhan

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengumpulan dan pengklasifikasian data rencana kebutuhan kantor berupa alat tulis kantor, peralatan rumah tangga, peralatan kantor, kendaraan mobilitas, sarana komunikasi/informasi, prasarana fisik, sarana khusus dan sarana penelitian.

KAP.0.1 Analisa Data

Naskah dinas yang berkenaan dengan analisa data kebutuhan kantor berupa alat tulis kantor, peralatan rumah tangga, peralatan kantor, kendaraan mobilitas, sarana komunikasi/informasi, prasarana fisik, sarana khusus dan sarana penelitian.

KAP.0.2 Rencana Kebutuhan

Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana kebutuhan kantor berupa alat tulis kantor, peralatan rumah tangga, peralatan kantor, kendaraan mobilitas, sarana komunikasi/informasi, prasarana fisik, sarana khusus dan sarana penelitian.

KAP.1 PENGADAAN

KAP.1.0 Alat Tulis Kantor

Naskah dinas yang berkenaan dengan alat tulis kantor, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan sampai dengan pelaporan.

/ KAP.1.1 Peralatan ...

- KAP.1.1 Peralatan Rumah Tangga
Naskah dinas yang berkenaan dengan peralatan rumah tangga antara lain : mesin stensil, faksimile, mesin foto copy, telepon, mesin ketik, komputer. Mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sampai dengan pelaporan.
- KAP.1.2 Peralatan Kantor
Naskah dinas yang berkenaan dengan peralatan kantor antara lain : meja, kursi, filling cabinet, almari. Mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sampai dengan pelaporan.
- KAP.1.3 Kendaraan Mobilitas
Naskah dinas yang berkenaan dengan kendaraan mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian sampai dengan pelaporan.
- KAP.1.4 Prasarana Fisik
Naskah dinas yang berkenaan dengan prasarana fisik antara lain : tanah, gedung, ruang kantor, rumah dinas, asrama, wisma mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian sampai dengan pelaporan.
- KAP.1.5 Sarana Komunikasi/Informasi
Naskah dinas yang berkenaan dengan sarana komunikasi/informasi mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sampai dengan pelaporan.
- KAP.1.6 Sarana Khusus
Naskah dinas yang berkenaan dengan sarana khusus antara lain : pesawat terbang, helikopter, pemadam kebakaran, *speedboat* mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sampai dengan pelaporan.
- KAP.1.7 Sarana Penelitian
Naskah dinas yang berkenaan dengan sarana penelitian mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sampai dengan pelaporan.
- KAP.2 INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA

/Naskah ...

Naskah dinas yang berkenaan dengan inventarisasi barang milik negara mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

KAP.3 PENGHAPUSAN, PEMINDAHTANGANAN, DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA

Naskah dinas yang berkenaan dengan penghapusan, pemindahtanganan, dan hibah barang inventaris milik negara mulai dari perencanaan penetapan penghapusan sampai dengan pelaporan.

DIK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

DIK.0 KEBUTUHAN DIKLAT

DIK.0.0 Analisa Diklat

Naskah dinas yang berkenaan dengan analisa kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

DIK.0.1 Program

Naskah dinas yang berkenaan dengan program mulai dari rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, perumusan kebijakan teknis sampai dengan penyelenggaraan diklat.

DIK.0.2 Pengembangan

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang berkenaan dengan penyiapan bahan, meliputi : penyusunan rencana, perumusan kebijakan, kerjasama pendidikan, bimbingan teknis.

DIK.1 PESERTA

DIK.1.0 Rencana

Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana peserta diklat mulai dari pembahasan sampai dengan penetapannya.

DIK.1.1 Persyaratan

Naskah dinas yang berkenaan dengan persyaratan peserta diklat mulai dari pembahasan sampai dengan penetapannya.

/DIK.1.2 Seleksi ...

- DIK.1.2 Seleksi dan Penerimaan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penerimaan peserta diklat mulai dari penilaian persyaratan administratif, ujian tertulis, ujian lisan/psikotes sampai dengan penetapan sebagai peserta diklat.

DIK.2 PENGAJARAN

- DIK.2.0 Kurikulum dan Silabus
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan kurikulum dan silabus diklat mulai dari pembahasan sampai dengan penetapan.
- DIK.2.1 Jadwal
Naskah dinas yang berkenaan dengan jadwal diklat mulai dari pembahasan sampai dengan penetapan.
- DIK.2.2 Sarana Pendidikan dan Pelatihan
Naskah dinas yang berkenaan dengan sarana pendidikan dan pelatihan mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan.
- DIK.2.3 Pengajar/Widyaiswara
Naskah dinas yang berkenaan dengan permohonan dan penugasan tenaga pengajar/widyaiswara.
- DIK.2.4 Praktek
Naskah dinas yang berkenaan dengan praktek peserta diklat mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan praktek peserta.

DIK.3 PENYELENGGARAAN

- DIK.3.0 Persiapan
Naskah dinas yang berkenaan dengan persiapan penyelenggaraan diklat baik yang berupa pembentukan panitia penyelenggara maupun rapat-rapat dalam rangka penyelenggaraan diklat.
- DIK.3.1 Pelaksanaan Diklat
Naskah dinas yang berkenaan dengan surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan

/penyelenggaraan ...

penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, hasil formulasi evaluasi penyelenggaraan diklat, sertifikasi/STTPL, sambutan penutupan diklat.

- DIK.3.2 Evaluasi Pasca Diklat
Naskah dinas yang berkenaan dengan kegiatan evaluasi pasca diklat mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan.

DIK. 4 SEKOLAH KEJURUAN KEHUTANAN

- DIK.4.0 Kurikulum dan Silabus
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan kurikulum dan silabus sekolah kejuruan kehutanan bidang pendidikan menengah dan pendidikan lanjutan yang dimulai dari pembahasan sampai dengan penetapan.
- DIK.4.1 Penerimaan
Naskah dinas yang berkenaan dengan proses penerimaan siswa mulai dari persiapan sampai dengan penerimaan siswa.
- DIK.4.2 Kegiatan Belajar Mengajar
Naskah dinas yang berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan.
- DIK.4.3 Evaluasi dan Laporan
Naskah dinas yang berkenaan dengan evaluasi belajar siswa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
- DIK.4.4 Ijazah
Naskah dinas yang berkenaan dengan penerbitan ijazah siswa mulai dari persiapan sampai dengan penerbitan ijazah siswa.
- DIK.4.5 Penempatan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penempatan siswa mulai dari perencanaan sampai dengan penempatan siswa.

/KUM HUKUM ...

KUM HUKUM

KUM.0 PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

- KUM.0.0 Produk Lembaga Tertinggi Negara
- KUM.0.1 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- KUM.0.2 Peraturan Pemerintah
- KUM.0.3 Peraturan Presiden
- KUM.0.4 Keputusan Presiden
- KUM.0.5 Instruksi Presiden

KUM.1 PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN

- KUM.1.0 Peraturan Bersama Menteri
- KUM.1.1 Keputusan Bersama Menteri
- KUM.1.2 Peraturan Menteri Kehutanan
- KUM.1.3 Keputusan Menteri Kehutanan
- KUM.1.4 Instruksi/Surat Edaran Menteri Kehutanan
- KUM.1.5 Peraturan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.
- KUM.1.6 Keputusan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.
- KUM.1.7 Instruksi/Surat Edaran Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/Kepala Badan.
- KUM.1.8 Peraturan/Keputusan Pejabat setingkat Eselon II
- KUM.1.9 Instruksi/Surat Edaran Pejabat setingkat Eselon II
- KUM.1.10 Peraturan/Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar)
- KUM.1.11 Peraturan/Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis (Balai)
- KUM.1.12 Peraturan/Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

KUM.2 SURAT PERINTAH

- KUM.2.0 Surat Perintah Menteri Kehutanan
- KUM.2.1 Surat Perintah Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.
- KUM.2.2 Surat Perintah Pejabat setingkat Eselon I
- KUM.2.3 Surat Perintah Kepala Unit Pelaksana Teknis

/KUM.3 NOTA ...

KUM.3 NOTA KESEPAHAMAN/MoU/KONTRAK/PERJANJIAN KERJASAMA

Naskah dinas yang berkenaan dengan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)*/Kontrak/Perjanjian Kerjasama/*Letter of Intens (LoI)* baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.

KUM.4 PIDANA

KUM.4.0 Kejahatan Umum

Naskah dinas yang berkenaan dengan tindak pidana kejahatan umum.

KUM.4.1 Kejahatan Khusus

Naskah dinas yang berkenaan dengan tindak pidana kejahatan khusus.

KUM.5 PERDATA

KUM.5.0 Notaris

KUM.5.1 Kedewasaan dan Perwalian

KUM.5.2 Harta Kekayaan

KUM.5.3 Bezit dan Hak-hak yang Timbul

KUM.5.4 Hak Milik Kebendaan/Sertifikat/IMB

KUM.5.5 Kontrak

KUM.5.6 Perikatan

KUM.5.7 Jual beli

KUM.5.8 Tukar Menukar

KUM.5.9 Pinjam Pakai

KUM.6 TATA USAHA NEGARA

Naskah dinas yang berkenaan dengan kasus/sengketa Tata Usaha Negara meliputi proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan vonis, berkas pembelaan dan bantuan hukum, telaah hukum dan opini hukum.

KUM.7 PEMBUKTIAN DAN KADALUWARSA

KUM.7.0 Pembuktian

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembuktian mulai dari proses sampai dengan penetapan.

KUM.7.1 Kadaluwarsa

Naskah dinas yang berkenaan dengan masalah kadaluwarsa mulai dari proses sampai dengan penetapan.

/KUM.7.2 Dispensasi ...

KUM.7.2 Dispensasi
Naskah dinas yang berkenaan dengan masalah dispensasi mulai dari pengusulan sampai dengan penetapan.

KUM.8 SOSIALISASI/PENYULUHAN/PEMBINAAN HUKUM

KUM.8.0 Hukum Agama
KUM.8.1 Hukum Internasional
KUM.8.2 Hukum Perselisihan
KUM.8.3 Pembinaan Hukum
KUM.8.4 Bantuan Hukum
KUM.8.5 Hukum Adat
KUM.8.6 Hukum Tata Usaha Negara

KUM.9 PELANGGARAN

KUM 9.0 Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum
KUM 9.1 Pelanggaran Kehutanan
KUM 9.2 Pelanggaran Kesusilaan
KUM 9.3 Sengketa Hukum

KUM.10 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)

KUM.10.0 Hak Cipta
KUM.10.1 Hak Paten
KUM.10.2 Hak Desain Industri
KUM.10.3 Hak Rahasia Dagang
KUM.10.4 Hak Merk
KUM.10.5 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLS)

HMS HUBUNGAN MASYARAKAT

HMS.0 HUBUNGAN LEMBAGA NEGARA

HMS.0.0 Hubungan Lembaga Tertinggi Negara dan Tinggi Negara.
Naskah dinas yang berkenaan dengan hubungan dan kerjasama lembaga tertinggi dan tinggi negara.

HMS.0.1 Hubungan Lembaga Pemerintah
Naskah dinas yang berkenaan dengan hubungan dan kerjasama lembaga pemerintah/antar kementerian.

HMS.1 HUBUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PERGURUAN TINGGI

/Naskah ...

Naskah dinas yang berkenaan dengan hubungan dan kerjasama lembaga pendidikan dan perguruan tinggi.

HMS.2 HUBUNGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PENDAPAT UMUM

HMS. 2.0 Hubungan Organisasi Kemasyarakatan
Naskah dinas yang berkenaan dengan hubungan dan kerjasama organisasi kemasyarakatan.

HMS.2.1 Hubungan Media Massa dan Pendapat Umum
Naskah dinas yang berkenaan dengan hubungan dan kerjasama media massa (siaran pers, konferensi pers, kunjungan wartawan/peliputan) serta pendapat umum.

HMS.2.2 Dengar Pendapat/*hearing* DPR-RI
Naskah dinas yang berkenaan dengan hubungan dan kerjasama DPR-RI (dengar pendapat/*hearing*).

HMS.3 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

HMS.3.0 Publikasi
Naskah dinas yang berkenaan dengan publikasi/penyebarluasan informasi antara lain : publikasi media elektronik, media cetak, naskah berita, poster, buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, dan klipng.

HMS.3.1 Dokumentasi
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/fakta kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing dalam berbagai media meliputi : kertas, foto, video, rekaman suara, multimedia serta tukar menukar dokumentasi.

HMS.3.2 Pameran
Naskah dinas yang berkenaan dengan pameran mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi dan laporan.

HMS.3.3 Bahan/Materi Pidato Pimpinan
Naskah dinas yang berkenaan dengan bahan/materi pidato Pimpinan.

KLN KERJASAMA LUAR NEGERI

KLN.0 HUBUNGAN KERJASAMA LUAR NEGERI

/KLN.0.0 Hubungan ...

- KLN.0.0 Hubungan Kerjasama Bilateral
Naskah dinas yang berkenaan dengan penjajagan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan sampai dengan pelaporan hubungan kerjasama bilateral.
- KLN.0.1 Hubungan Kerjasama Regional
Naskah dinas yang berkenaan dengan penjajagan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan sampai dengan pelaporan hubungan kerjasama regional.
- KLN.0.2 Hubungan Kerjasama Multilateral
Naskah dinas yang berkenaan dengan penjajagan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan sampai dengan pelaporan hubungan kerjasama multilateral.
- KLN.0.3 Hubungan Kerjasama dengan Badan-badan PBB dan Non PBB.
Naskah dinas yang berkenaan dengan penjajagan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan sampai dengan pelaporan hubungan kerjasama dengan Badan-badan PBB maupun Badan-badan Internasional Non PBB.
- KLN.1 BANTUAN TEKNIS
 - KLN.1.0 Bantuan Keuangan
Naskah dinas yang berkenaan dengan bantuan keuangan berupa pinjaman atau hibah dari luar negeri yang terdiri dari : penjajagan bantuan keuangan, persiapan/penerimaan bantuan keuangan, administrasi dan laporan, evaluasi dan laporan bantuan keuangan.
 - KLN.1.1 Bantuan Tenaga Ahli
Naskah dinas yang berkenaan dengan bantuan tenaga ahli yang terdiri dari : penjajagan bantuan tenaga ahli, penerimaan/penempatan tenaga ahli, perpanjangan bantuan tenaga ahli, evaluasi dan laporan bantuan tenaga ahli.

/KLN.1.2 Bantuan ...

- KLN.1.2 Bantuan Bea Siswa
Naskah dinas yang berkenaan dengan bantuan beasiswa dari/ke luar negeri terdiri dari : penjajagan bantuan proyek, penerimaan/pemberian bantuan proyek, evaluasi dan laporan bantuan proyek.
- KLN.1.3 Bantuan Sarana Prasarana
Naskah dinas yang berkenaan dengan bantuan sarana prasarana dari/ke luar negeri terdiri dari : penjajagan bantuan, penerimaan/pemberian bantuan, evaluasi dan laporan bantuan.
- KLN.2 PELAKSANAAN KONVENSI DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
- KLN.2.0 Monitoring Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Internasional.
Naskah dinas yang berkenaan dengan monitoring pelaksanaan konvensi dan perjanjian internasional mulai dari persiapan/perencanaan sampai dengan pelaporan.
- KLN.2.1 Pembahasan Konvensi dan Perjanjian Internasional.
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembahasan konvensi dan perjanjian internasional mulai dari persiapan/ perencanaan sampai dengan pelaporan.
- KLN.2.2 Tindak Lanjut Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Internasional.
Naskah dinas yang berkenaan dengan tindak lanjut pelaksanaan konvensi dan perjanjian internasional sejak dari persiapan/perencanaan sampai dengan pelaporan.
- KLN.3 KUNJUNGAN MISI LUAR NEGERI/PERWAKILAN ASING
- KLN 3.0 Penerimaan Kunjungan Misi/Perwakilan Asing
Naskah dinas yang berkenaan dengan penerimaan kunjungan misi/perwakilan asing mulai dari persiapan/ perencanaan sampai dengan pelaporan.
- KLN 3.1 Penyediaan Bahan Informasi
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyediaan bahan informasi kunjungan misi/perwakilan asing.
- KLN.4 PERTEMUAN ILMIAH

/Naskah ...

Naskah dinas yang berkenaan dengan kongres, konferensi, seminar dan/atau lokakarya yang diselenggarakan atas bantuan/kerjasama dengan luar negeri yang diadakan baik di dalam/luar negeri mulai dari perencanaan sampai dengan laporan ilmiah.

KLN.5 PROMOSI DAN INVESTASI

Naskah dinas yang berkenaan dengan promosi, investasi dan perdagangan internasional mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

WAS PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

WAS.0 RENCANA PENGAWASAN

- WAS.0.0 Rencana Strategis Pengawasan
- WAS.0.1 Rencana Kerja Tahunan
- WAS.0.2 Rencana Kinerja Tahunan
- WAS.0.3 Penetapan Kinerja Tahunan
- WAS.0.4 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional

WAS.1 PEDOMAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan pedoman kebijakan pengawasan sampai dengan penetapannya.

WAS.2 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan sampai dengan penetapannya.

WAS.3 PELAKSANAAN PENGAWASAN

- WAS.3.0 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL).
- WAS.3.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasioanal (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL).
- WAS.3.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut (TL).

/WAS.3.3 Laporan ...

- WAS.3.3 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat.
- WAS.3.4 Laporan Pemutakhiran Data
- WAS.3.5 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
- WAS.3.6 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Kementerian Kehutanan
- WAS.3.7 *Good Corporate Governance (GCG)*
- WAS.4 PEMERIKSAAN KHUSUS

Naskah dinas yang berkenaan dengan pemeriksaan khusus tentang penyelesaian kasus-kasus yang merugikan negara.
- WAS.5 KERTAS KERJA PEMERIKSAAN, LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS
 - WAS.5.0 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Yang Perlu Ditindaklanjuti

Naskah dinas yang berkenaan dengan kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus yang perlu ditindaklanjuti.
 - WAS.5.1 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Yang Tidak Perlu Ditindaklanjuti

Naskah dinas yang berkenaan dengan kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus yang tidak perlu ditindaklanjuti.
- WAS.6 LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan pelaporan pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- WAS.7 SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)/SISTEM PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH (SPIP)

Naskah dinas yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Satuan Pengawasan Intern (SPI) / Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah (SPIP)
- WAS.8 HASIL ANALISIS LAPORAN PENGAWASAN

/Naskah ..

Naskah dinas yang berkenaan dengan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah dan laporan pengawasan lainnya, serta penyusunan hasil analisis dan evaluasi.

REN PERENCANAAN

REN.0 RENCANA STRATEGIS

REN.0.0 Rencana Umum Kehutanan Nasional

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembangunan jangka panjang kehutanan, Rencana Kinerja (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra), Pelita Kehutanan, Sarlita Kehutanan, Rapat Kerja Nasional Kehutanan, bahan ceramah Menteri Kehutanan dimulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan.

REN.0.1 Rencana Umum Kehutanan Regional

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan kehutanan di tingkat Regional.

REN.1 KAJIAN DAN ANALISIS RENCANA DAN KEBIJAKAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, kajian rencana dan kebijakan kehutanan, analisis rencana dan program pembangunan kehutanan, pertimbangan teknis rencana dan kebijakan kehutanan.

REN.2 RENCANA PEMBANGUNAN

REN.2.0 Rencana Program

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan rencana program mulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan.

REN.2.1 Rencana Umum Pembangunan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan rencana umum pembangunan mulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan.

/REN.2.2 Inpres ...

- REN.2.2 Inpres
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan Inpres mulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan.

REN.3 EVALUASI PROGRAM DAN KINERJA

- REN.3.0 Evaluasi Program Kementerian/Unit Kerja
Naskah dinas yang berkenaan dengan evaluasi program Kementerian/unit kerja.
- REN.3.1 Evaluasi Kinerja Kementerian/Unit Kerja
Naskah dinas yang berkenaan dengan evaluasi kinerja Kementerian/unit kerja.

KEGIATAN SUBSTANTIF

LUH PENYULUHAN

LUH.0 PROGRAM KERJA PENYULUHAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan rencana program kerja penyuluhan mulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan.

LUH.1 MATERI PENYULUHAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan materi penyuluhan mulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan.

LUH.2 PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan programa, bimbingan teknis, dan evaluasi.

LUH.3 SARANA PENYULUHAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan sarana penyuluhan mulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan.

LUH.4 TENAGA PENYULUHAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan tenaga penyuluhan mulai dari penunjukan tenaga penyuluhan sampai dengan pengembangan tenaga penyuluhan.

/LUH.5 PEMBERDAYAAN ...

LUH.5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Naskah dinas yang berkenaan dengan bimbingan teknis, pembinaan kelembagaan dan evaluasi.

LUH.6 PELAKSANAAN PENYULUHAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan pelaksanaan penyuluhan mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan penyuluhan.

LUH.7 EVALUASI, DESIMINASI DAN LAPORAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan evaluasi, desiminasi dan laporan pelaksanaan penyuluhan.

PLA PLANOLOGI KEHUTANAN

PLA.0 PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

PLA.0.0 Perencanaan Makro Kawasan Hutan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana makro penyusunan kawasan hutan nasional, rencana kehutanan nasional, perencanaan wilayah pengelolaan hutan, evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau sektor kehutanan.

PLA.0.1 Penataan Ruang Kawasan Hutan

Naskah dinas yang berkenaan, Sulawesi, Maluku dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (TR 1), Kalimantan dan Papua (TR 2).

PLA.0.2 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan penyajian statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan.

/PLA.1 PENGUKUHAN ...

PLA.1 PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

PLA.1.0 Pengukuhan Kawasan Hutan :

- Naskah dinas yang berkenaan dengan penunjukan kawasan hutan provinsi.
- Naskah dinas yang berkenaan dengan penunjukan kawasan hutan parsial yang berasal dari lahan pengganti.
- Naskah dinas yang berkenaan dengan penunjukan kawasan hutan parsial yang berasal dari lahan kompensasi.
- Naskah dinas yang berkenaan dengan penunjukan kawasan hutan parsial yang berasal dari lahan lainnya.
- Naskah dinas yang berkenaan dengan penataan batas, pemetaan, penetapan kawasan hutan dan pengesahan Berita Acara Tata Batas (BATB).
- Naskah dinas yang berkenaan dengan penataan batas, pemetaan, penetapan kawasan hutan dan areal kerja.
- Naskah dinas yang berkenaan dengan penetapan areal kerja Ijin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA), Ijin Pengusahaan Taman Buru (IPTB).
- Naskah dinas yang berkenaan dengan penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

PLA.1.1 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan

- Naskah dinas yang berkenaan dengan perubahan fungsi kawasan hutan.
- Naskah dinas yang berkenaan dengan relokasi fungsi kawasan hutan.
- Naskah dinas yang berkenaan dengan tukar menukar kawasan hutan.
- Naskah dinas yang berkenaan dengan pelepasan kawasan hutan (kebun, transmigrasi, non kehutanan lainnya).

PLA.1.2 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan

Naskah dinas yang berkenaan dengan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

PLA.2 INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

/PLA.2.0 Inventarisasi ...

PLA.2.0 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang inventarisasi flora berupa kayu dan bukan kayu serta sosial budaya masyarakat didalam dan sekitar hutan, inventarisasi hutan tingkat nasional/wilayah/unit pengelolaan, dan penyusunan neraca sumber daya hutan.

PLA.2.1 Pemantauan Sumber Daya Hutan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya hutan tingkat nasional, wilayah dan unit pengelolaan.

PLA.2.2 Pemetaan Sumber Daya Hutan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyajian informasi dan dokumentasi, pelayanan, serta distribusi peta sumber daya hutan.

PLA.2.3 Jaringan Data Spasial
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembangunan basis dan aliran data spasial serta monitoring dan evaluasi kemampuan jaringan dalam akses basis data spasial kehutanan.

PLA.3 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

PLA.3.0 Penggunaan Kawasan Hutan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dan non pertambangan :
- Naskah dinas yang berkenaan dengan syarat kelengkapan, permohonan ijin kegiatan eksplorasi penggunaan kawasan hutan;

/- Naskah ...

- Naskah dinas yang berkenaan dengan syarat kelengkapan, permohonan eksploitasi penggunaan kawasan hutan;
- Naskah dinas yang berkenaan dengan penolakan pinjam pakai kawasan hutan.

PLA.3.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan penggunaan kawasan hutan (pertambangan dan non pertambangan) untuk pembangunan di luar kehutanan.

- Naskah dinas yang berkenaan dengan Setoran Bukan Pajak;
- Naskah dinas yang berkenaan dengan *Baseline* (Form PNBP 1-3);
- Naskah dinas yang berkenaan dengan persuratan peringatan;
- Naskah dinas yang berkenaan dengan Berita Acara Verifikasi Lapangan.

PLA.3.2 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi penggunaan kawasan hutan.

- Naskah dinas yang berkenaan dengan verifikasi administrasi dan teknis;
- Naskah dinas yang berkenaan dengan ijin kegiatan eksplorasi;
- Naskah dinas yang berkenaan dengan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan;
- Naskah dinas yang berkenaan dengan ijin pinjam pakai kawasan hutan;
- Naskah dinas yang berkenaan dengan ijin dispensasi kawasan hutan.
- Naskah dinas yang berkenaan dengan pengakhiran perjanjian kawasan hutan.

PLA.4 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL PEMANFAATAN HUTAN

/PLA.4.0 Pembentukan ...

- PLA.4.0 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di wilayah.
- PLA.4.1 Penyiapan Areal Pemantapan kawasan Hutan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan alam, hutan kemasyarakatan, wisata alam, jasa lingkungan, hutan tanaman, dan hutan tanaman rakyat di wilayah.
- PLA.4.2 Informasi Wilayah Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan informasi pembentukan wilayah dan informasi geografis pemanfaatan kawasan hutan.

BUK BINA USAHA KEHUTANAN

BUK.0 DATA AREAL HPH

- BUK.0.0 Areal HPH
Naskah dinas yang berkenaan dengan permohonan areal HPH, perkebunan dan/atau peruntukan lain.
- BUK.0.1 SK HPH
Naskah dinas yang berkenaan dengan keputusan pemberian HPH dan addendum.
- BUK.0.2 Kerjasama
Naskah dinas yang berkenaan dengan kerjasama kontrak kerja atau *joint venture* antara perusahaan HPH (termasuk penggabungan perusahaan).
- BUK.0.3 Pembatalan/Penolakan
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembatalan, penolakan dan/atau pengembalian areal permohonan/pencadangan (termasuk pengembangan areal, pencabutan HPH).

/BUK.1 MODAL ...

BUK.1 MODAL DAN PERALATAN

BUK.1.0 Investasi Industri

Naskah dinas yang berkenaan dengan investasi *logging* dari perusahaan HPH, PMA, PMDN, *joint venture* swasta nasional mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan investasi.

BUK.1.1 Peralatan

Naskah dinas yang berkenaan dengan peralatan perusahaan hutan mulai dari rencana penggunaan, izin pemasukan dan penggunaan alat, realisasi pemasukan dan penggunaan alat, surat tanda nomor laporan keadaan alat, dan penghapusan.

BUK.1.2 Tenaga Kerja

Naskah dinas yang berkenaan dengan tenaga kerja perusahaan hutan.

BUK.1.3 Pemegang Saham

Naskah dinas yang berkenaan dengan akte pendirian dan perubahannya, pengesahan dan pengalihan saham.

BUK.1.4 Neraca Perusahaan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan dan pengesahan neraca perusahaan.

BUK.2 RENCANA KARYA

BUK.2.0 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana karya KPHP mulai dari penyusunan sampai dengan pengesahannya.

BUK.2.1 Rencana Karya Perusahaan Hutan (RKPH)

Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana karya perusahaan hutan mulai dari penyusunan sampai dengan pengesahan RKPH.

BUK.2.2 Rencana Karya Tahunan Perusahaan Hutan (RKT)

Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana karya tahunan perusahaan hutan mulai dari penyusunan sampai dengan pengesahan RKT.

/BUK.2.3 Rencana ...

BUK.2.3 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana karya lima tahun pengusahaan hutan mulai dari penyusunan sampai dengan pengesahan RKL.

BUK.3 PERPANJANGAN HPH

Naskah dinas yang berkenaan dengan permohonan perpanjangan HPH mulai dari permohonan sampai dengan keputusan/persetujuan perpanjangan HPH sementara/definitif.

BUK.4 PRODUKSI

BUK.4.0 Target Produksi
Naskah dinas yang berkenaan dengan target produksi pengusahaan HPH/IPK antara lain RKT, bagan kerja.

BUK.4.1 Produksi Kayu
Naskah dinas yang berkenaan dengan produksi kayu perusahaan HPH meliputi : penggergajian *veneer/plywood, fibre board, pulp, paper chip, wood working dan integrated wood* produksi termasuk data produksi.

BUK.4.2 Produksi Non Kayu
Naskah dinas yang berkenaan dengan produksi non kayu dari perusahaan HPH/HPHH, perusahaan negara kehutanan yang meliputi *trial production*, berhenti produksi dan tata produksi.

BUK.5 INDUSTRI

BUK.5.0 Industri Kayu HPH
Naskah dinas yang berkenaan dengan industri kayu perusahaan HPH yang meliputi : penggergajian *veneer/ plywood, fibre board, pulp, paper chip, wood working dan integrated wood* industri termasuk data industri.

BUK.5.1 Industri Kayu Non HPH
Naskah dinas yang berkenaan dengan industri kayu dari perusahaan non HPH yang meliputi : penggergajian *veneer/plywood, fibre board, pulp, paper chip, wood working dan integrated wood* industri termasuk data industri.

/BUK.5.2 Industri ...

- BUK.5.2 Industri Non Kayu
Naskah dinas yang berkenaan dengan industri non kayu yang meliputi : rotan, arang, sutera alam, kayu putih, lebah dan lak.
- BUK.6 PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
- BUK.6.0 Hutan Tanaman Industri *Pulp*.
Naskah dinas yang berkenaan dengan hutan tanaman industri pulp mulai dari permohonan sampai dengan persetujuan/penetapannya.
- BUK.6.1 Hutan Tanaman Industri Pertukangan
Naskah dinas yang berkenaan dengan hutan tanaman industri pertukangan mulai dari permohonan sampai dengan persetujuan/ penetapannya.
- BUK.7 PELANGGARAN DAN SANKSI
Naskah dinas yang berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran para pemegang HPH beserta sanksi-sanksinya yang meliputi pemblokiran, denda/*pinalty* dan pencabutan areal HPH.
- BUK.8 PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
- BUK.8.0 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur dibidang pola pemanfaatan hutan produksi serta penyusunan pola, dan pertimbangan teknis penggunaan kawasan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan pada kawasan hutan produksi.
- BUK.8.1 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
Naskah dinas yang berkenaan dengan penataan pemanfaatan hutan produksi yang meliputi penyiapan perumusan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur dibidang penataan pemanfaatan hutan produksi serta penyiapan areal untuk unit usaha pemanfaatan hutan produksi.

/BUK.8.2 Informasi ...

BUK.8.2 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur dibidang informasi sumber daya hutan produksi serta penyusunan informasi sumber daya hutan produksi.

BUK.8.3 Pengembangan Investasi Usaha
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi serta promosi investasi pemanfaatan hutan produksi.

BUK.9 PENGEMBANGAN HUTAN ALAM

BUK.9.0 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur dibidang penyiapan usaha pemanfaatan hutan produksi alam, serta pemberian perizinan dan kemitraan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam.

BUK.9.1 Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur, dibidang rencana kerja pemanfaatan hutan alam pada usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, serta rencana kerja jangka panjang pemanfaatan dan restorasi ekosistem pada hutan produksi alam.

BUK.9.2 Produksi Hutan Alam
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur dibidang produksi, silvikultur, *reduce impact logging*, serta pemberian ijin /pemanfaatan ...

pemanfaatan kayu, dan peralatan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam.

- BUK.9.3 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan, restrukturisasi usaha dan jaminan kinerja pemanfaatan hutan produksi alam.

BUK.10 PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN

- BUK.10.0 Hutan Tanaman Industri
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang hutan tanaman industri, serta penyiapan pemberian perijinan usaha pemanfaatan hutan tanaman industri.

- BUK.10.1 Hutan Tanaman Rakyat
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang hutan tanaman rakyat, dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan tanaman.

- BUK.10.2 Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang rencana kerja dan produksi hutan tanaman, serta pengesahan rencana kerja jangka panjang berikut pemberian ijin peralatan pemanfaatan hutan tanaman.

- BUK.10.3 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang penilaian kinerja usaha /pemanfaatan ...

pemanfaatan hutan tanaman, serta penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman.

BUK.10.4 Pembiayaan Hutan Tanaman

Naskah dinas yang berkenaan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, analisis kredit, prosedur dan kriteria pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan hutan tanaman.

BUK.11 IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

BUK.11.0 Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang iuran kehutanan meliputi iuran ijin usaha pemanfaatan hutan alam/tanaman, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi.

BUK.11.1 Peredaran Hasil Hutan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata usaha hasil hutan dan legalitasnya.

BUK.11.2 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pengujian hasil hutan yang meliputi metode, sarana, dan tenaga teknis hutan produksi, serta sertifikasi tenaga teknis hutan produksi yang meliputi perencana, perisalah (*cruiser*), penguji (*grader*), pengukur (*scaler*), pembuka wilayah hutan, pemanen dan pembinaan hutan.

BUK.11.3 Penertiban Peredaran Hasil Hutan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penertiban peredaran hasil hutan.

BUK.12 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

/BUK.12.0 Pemolaan ...

BUK.12.0 Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan bahan penyusunan bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria, serta prosedur di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, serta revitalisasi dan restrukturisasi, pemberdayaan dan kemitraan industri primer, perizinan, investasi/divestasi, *reengineering*, pemantauan pengelolaan lingkungan dan ketenagakerjaan industri primer hasil hutan.

BUK.12.1 Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan bahan penyusunan bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria, serta prosedur di bidang pengendalian lahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan standardisasi produksi industri primer hasil hutan.

BUK.12.2 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan bahan penyusunan bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, kriteria, serta prosedur di bidang penilaian kinerja industri, kesehatan finansial, evaluasi dan pemeriksaan, tindak lanjut hasil evaluasi industri dan pemasaran hasil hutan dalam negeri dan internasional, promosi, harga dan konsumsi hasil hutan.

BUK.13 PEMBINAAN HUTAN

BUK.13.0 Pembinaan HPH

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembinaan/pendisiplinan HPH yang meliputi : *performance* HPH, peringatan-peringatan, bimbingan/pembinaan HPH.

BUK.13.1 Pembinaan TPTI

Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana TPTI, realisasi pembinaan hutan TPTI (biaya dan fisik) perlindungan hutan.

/STD STANDARDISASI ...

STD STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN

STD.0 STANDARDISASI

STD.0.0 Kayu

Naskah dinas yang berkenaan dengan standardisasi kayu yang meliputi kayu rimba jati, kayu konversi dan kayu khusus.

STD.0.1 Non Kayu

Naskah dinas yang berkenaan dengan standardisasi non kayu yang terdiri dari rotan, damar/ramin, minyak atsiri, sutera alam, minyak kayu putih, arang dan hasil hutan lainnya.

STD.0.2 Produk

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan bahan rancangan perumusan standar produk kehutanan.

STD.0.3 Proses

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan bahan rancangan perumusan standar proses pengelolaan hutan.

STD.1 SARANA PENGUJIAN HASIL HUTAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengujian hasil hutan yang meliputi alat ukur/uji, tempat pengujian dan pengujian hasil hutan mulai dari permohonan sampai dengan penebangannya, termasuk hasil pengujian dan hasil pengawasan pengujian.

STD.2 PENGEMBANGAN

STD.2.0 Pengembangan Perusahaan

Naskah dinas yang berkenaan dengan perusahaan mulai dari informasi asosiasi, pembinaan sampai dengan analisa pengembangannya.

STD.2.1 Pengembangan Pemasaran.

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengembangan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri, mulai dari informasi pasar, promosi, analisa kayu, harga patokan sampai dengan analisa pengembangannya.

/STD.3 PEMASARAN ...

STD.3 PEMASARAN HASIL HUTAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan pemasaran hasil hutan baik di dalam maupun di luar negeri antara lain target ekspor, permohonan ekspor, realisasi ekspor.

STD.4 PENGENDALIAN LINGKUNGAN

STD.4.0 Amdal di Dalam Kawasan Hutan

Naskah dinas yang berkenaan dengan amdal hak pengusahaan hutan kayu, amdal hak pengusahaan hutan non kayu, amdal pembangunan hutan tanaman industri, amdal pengusahaan wisata alam pada taman nasional, taman wisata, taman buru, dan kawasan konservasi lainnya.

STD.4.1 Amdal di Luar Kawasan Hutan

Naskah dinas yang berkenaan dengan amdal pembangunan terminal perkayuan, amdal pengusahaan penangkaran satwa liar, amdal pembangunan hutan kota, amdal pembangunan taman safari dan/atau taman margasatwa, amdal pembangunan kebun binatang, amdal introduksi jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa.

STD.5 ANGKUTAN HASIL HUTAN

STD.5.0 Sarana dan Prasarana

Naskah dinas yang berkenaan dengan sarana dan prasarana angkutan hasil hutan yang meliputi pengembangan armada, kerjasama angkutan, tempat pemuatan hasil hutan, tempat pengumpulan termasuk ijin *logpond* dan pengukuran.

STD.5.1 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan.

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembinaan penyelenggaraan angkutan dan peningkatan dayaguna angkutan hasil hutan yang meliputi biaya angkutan dan biaya bongkar muat/uang tambang.

STD.6 TATA USAHA HASIL HUTAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan tata usaha hasil hutan yang meliputi tanda pengenal perusahaan, legalitas, palu tok kualitas, pas angkutan dan Sertifikat Ekspor Hasil Hutan (SEHH) termasuk pendistribusian palu tok.

PKA PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

/PKA.0 KONSERVASI ...

PKA.0 KONSERVASI JENIS DAN GENETIK

PKA.0.0 Flora dan Fauna yang Dilindungi

Naskah dinas yang berkenaan dengan flora dan fauna yang dilindungi meliputi pengawasan, penyebaran, penelitian/penyerahan, penangkaran, populasi, peredaran, pemeliharaan, rehabilitasi/pelepasan, *breeding*, identifikasi dan karantina serta pelestarian pemanfaatan termasuk perijinan dan pengurusan.

PKA.0.1 Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi

Naskah dinas yang berkenaan dengan flora dan fauna yang tidak dilindungi meliputi pembinaan, pengawasan, pemanfaatan, peredaran, perijinan dan pengurusan.

PKA.0.2 Lembaga Konservasi /Kebun Binatang.

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembinaan, pengembangbiakan satwa, tukarmenukar satwa, perijinan dan pengurusan.

PKA.0.3 Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, dan penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang konvensi dan kerjasama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati.

PKA.1 KAWASAN KONSERVASI

PKA.1.0 Cagar Alam

Naskah dinas yang berkenaan dengan usul pencadangan, penunjukan, pemangkuan, pengawasan, pembinaan, pemanfaatan, perijinan dan evaluasi kawasan cagar alam.

PKA.1.1 Suaka Margasatwa

Naskah dinas yang berkenaan dengan usul pencadangan, penunjukan, pemangkuan, pengawasan, pembinaan, pemanfaatan, perijinan dan evaluasi kawasan suaka margasatwa.

/PKA.1.2 Taman ...

- PKA.1.2 Taman Wisata
Naskah dinas yang berkenaan dengan usul pencadangan, penunjukan, pemangkuan, pengawasan, pembinaan, pemanfaatan, perijinan dan evaluasi kawasan taman wisata.
- PKA.1.3 Taman Buru
Naskah dinas yang berkenaan dengan usul pencadangan, penunjukan, pemangkuan, pengawasan, pembinaan, pemanfaatan, perijinan dan evaluasi kawasan taman buru.
- PKA.1.4 Taman Nasional
Naskah dinas yang berkenaan dengan usul pencadangan, penunjukan, pemangkuan, pengawasan, pembinaan, pemanfaatan, perijinan dan evaluasi kawasan taman nasional.
- PKA.1.5 Taman Hutan Raya
Naskah dinas yang berkenaan dengan usul pencadangan, penunjukan, pemangkuan, pengawasan, pembinaan, pemanfaatan, perijinan dan evaluasi kawasan taman hutan raya.
- PKA.1.6 Hutan Lindung dan Suaka Alam
Naskah dinas yang berkenaan dengan usul pencadangan, penunjukan, pemangkuan, pengawasan, pembinaan, pemanfaatan, perijinan dan evaluasi kawasan hutan lindung dan suaka alam.
- PKA.1.7 Lahan Basah dan Konservasi Laut
Naskah dinas yang berkenaan dengan usul pencadangan, penunjukan, pemangkuan, pengawasan, pembinaan, pemanfaatan, perijinan dan evaluasi kawasan lahan basah dan konservasi laut.
- PKA.1.8 Gua/*Karst*
Naskah dinas yang berkenaan dengan usul pencadangan, penunjukan, pemangkuan, pengawasan, pembinaan, pemanfaatan, perijinan dan evaluasi kawasan gua/*karst*.
- PKA.2 PENGAMANAN HUTAN
- /PKA.2.0 Pelanggaran ...

- PKA.2.0 Pelanggaran
Naskah dinas yang berkenaan dengan pelanggaran hutan meliputi penyerobotan, pencurian, perusakan, perburuan liar, penyelundupan flora fauna, pemukiman liar mulai dari identifikasi sampai dengan cara penanggulangan.
- PKA.2.1 Bencana Alam
Naskah dinas yang berkenaan dengan kerusakan hutan yang disebabkan oleh bencana alam meliputi : banjir, tanah longsor, angin ribut, pelapukan sampai dengan cara penanggulangan.
- PKA.2.2 Kebakaran Hutan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pencegahan dan penanggulangan dampak kebakaran, pemadaman serta pengembangan tenaga, prasarana dan sarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- PKA.2.3 Sengketa Hutan
Naskah dinas yang berkenaan dengan sengketa areal dan sengketa kerjasama mengenai masalah hutan dengan kepentingan penggunaan dan pemanfaatan.
- PKA.2.4 Hama dan Penyakit
Naskah dinas yang berkenaan dengan kerusakan hutan yang diakibatkan oleh hama dan penyakit mulai dari identifikasi sampai dengan penanggulangan.
- PKA.3 PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN
- PKA.3.0 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi penyidikan dan perlindungan hutan.

/PKA.3.1. Penyidikan ...

- PKA.3.1 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan *illegal logging*, perambahan hutan serta penagggulangan peredaran tumbuhan, satwa liar ilegal, hama penyakit, perburuan dan kebakaran hutan di wilayah.
- PKA.3.2 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis di bidang pengembangan dan pembinaan polisi kehutanan/jagawana dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- PKA.4 PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM
- PKA.4.0 Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan jasa lingkungan, dan peningkatan objek serta daya tarik wisata alam.
- PKA.4.1 Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis, promosi dan investasi di bidang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan non konservasi.
- PKA.4.2 Pemanfaatan Wisata Alam
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis, evaluasi, promosi dan investasi wisata alam dibidang pemanfaatan taman nasional dan non taman nasional.
- PKA. 5 BINA CINTA ALAM
- /PKA.5.0 Cinta ...

- PKA.5.0 Cinta Alam
Naskah dinas yang berkenaan dengan data organisasi pecinta alam, bumi perkemahan, pusat informasi konservasi alam, kerjasama dengan instansi lain, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan.
- PKA.5.1 Kader Konservasi Sumber Daya Alam.
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, pembinaan dan pengembangan, jumlah dan penyebaran kader konservasi sumber daya alam, pemandu wisata kelompok pecinta alam dan peran serta masyarakat.

DAS BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL

DAS.0 PERBENIHAN

- DAS.0.0 Pemolaan Benih
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan serta naskah kerjasama teknis.
- DAS.0.1 Kebun Benih
Naskah dinas yang berkenaan dengan kebun benih mulai dari perencanaan, pengusulan, penolakan/persetujuan, pelaksanaan usul revisi sampai dengan pemeliharaan dan bimbingan.
- DAS.0.2 Tegakan Benih
Naskah dinas yang berkenaan dengan tegakan benih, mulai dari perencanaan, pengusulan, penolakan/persetujuan, pelaksanaan usul revisi sampai dengan pemeliharaan dan bimbingan.
- DAS.0.3 Pengadaan Benih
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengadaan benih/penyuluhan benih, mulai dari perencanaan sampai dengan pengadaan benih baik dari persemaian sendiri, pembelian dari pihak ketiga maupun dari hutan.

/DAS.0.4 Pengujian ...

- DAS.0.4 Pengujian dan Penyimpanan Benih
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengujian mutu benih (termasuk pemberian) sampai dengan penyimpanannya di gudang atau di *Dry Coldstorage*.
- DAS.0.5 Lalu Lintas Angkutan Benih
Naskah dinas yang berkenaan dengan lalu lintas pengangkutan benih antar daerah/antar pulau, termasuk tukar menukar benih.
- DAS.0.6 Pembibitan
Naskah dinas yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan teknis pembibitan/persemaian yang meliputi : rencana lokasi, luas dan jenisnya (termasuk revisi perencanaan, pembibitan/persemaian) sampai dengan realisasi pemeliharaan.
- DAS.0.7 Pengembangan Sumber Benih
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang pengembangan sumber benih, produksi benih dan bibit serta sumber daya genetik tanaman hutan dan pembangunan pengembangan sumber benih.
- DAS.0.8 Pengembangan Usaha Perbenihan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang pengembangan kelembagaan dan usaha perbenihan, pembibitan tanaman hutan serta naskah kerjasama teknis.
- DAS.0.9 Pengendalian Peredaran Benih
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang pengendalian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi peredaran benih/bibit, sertifikasi dan labelisasi serta ijin ekspor impor benih dan bibit tanaman hutan.
- DAS.1 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
- /DAS.1.0 Pemolaan ...

- DAS.1.0 Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang penyusunan data dasar dan informasi, perencanaan dan monitoring evaluasi rehabilitasi hutan dan lahan.
- DAS.1.1 Rehabilitasi Hutan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi hutan lindung, reboisasi hutan produksi, dan hutan konservasi.
- DAS.1.2 Rehabilitasi Lahan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi lahan, program penanaman satu milyar pohon, acara hari menanam pohon Indonesia, pembangunan dan pengembangan hutan rakyat, penghijauan lingkungan dan hutan kota.
- DAS.1.3 Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa, dan Gambut.
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi dan pemanfaatan hutan mangrove, hutan pantai, rawa, dan gambut di dalam dan di luar kawasan hutan.
- DAS.1.4 Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang reklamasi hutan dan konservasi tanah di kawasan hutan, pertanian, industri, pemukiman, jalan dan reklamasi hutan.

DAS.2 TANAMAN REBOISASI

/DAS.2.0 Reboisasi ...

- DAS.2.0 Reboisasi Lahan Kritis
Naskah dinas yang berkenaan dengan perencanaan tanaman reboisasi lahan kritis yang meliputi : rencana lokasi, luas dan jenis tanaman, persiapan (pengolahan tanah, tanaman sela dan ilaran api sampai dengan realisasi pemeliharaan yang meliputi pelaksanaan oleh pihak ketiga, tumpang sari, dan pemupukan).
- DAS.2.1 Reboisasi Areal HPH
Naskah dinas yang berkenaan dengan perencanaan persiapan sampai dengan realisasi reboisasi areal HPH, untuk hutan tanaman industri mulai dari identifikasi lahan dan desain termasuk tanaman jenis kayu.
- DAS.3 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
- DAS.3.0 Pemolaan Pengelolaan DAS
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang data dasar dan informasi serta perencanaan pengelolaan DAS.
- DAS.3.1 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang kajian dan formulasi kelembagaan pengelolaan DAS.
- DAS.3.2 Teknik Pengelolaan DAS
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang teknik pengelolaan DAS.
- DAS.3.3 Evaluasi Pengelolaan DAS
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang pemantauan dan evaluasi biofisik meliputi : penggunaan lahan, erosi, sedimentasi, dan tata air DAS, serta evaluasi sosial ekonomi pengelolaan DAS.
- DAS.4 PERHUTANAN SOSIAL
- /DAS.4.0 Pemolaan ...

- DAS.4.0 Pemolaan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang perencanaan serta data dasar dan informasi perhutanan sosial.
- DAS.4.1 Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang pengembangan hutan kemasyarakatan.
- DAS.4.2 Pengembangan Hutan Desa
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang pengembangan hutan desa.
- DAS.4.3 Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang pengembangan hutan hak dan kemitraan.
- DAS.4.4 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis dibidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan.
- DAS.4.5 Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan (HHBK/AUK)
Naskah dinas yang berkenaan dengan hasil hutan bukan kayu/aneka usaha kehutanan mulai dari perencanaan, pembibitan/penanaman dan pemeliharaan sampai dengan realisasi produksi.

DAS.5 PENGENDALIAN PERLADANGAN

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengendalian perladangan mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi yang terdiri dari penentuan lokasi, pemupukan lokasi, pengelolaan tanah, pemindahan penduduk, dan pembuatan sarana.

/LIT PENELITIAN ...

LIT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

LIT.0 PERENCANAAN PROGRAM PENELITIAN

LIT.0.0 Penyusunan rencana anggaran penelitian dan pengembangan.
Naskah dinas yang berkenaan dengan anggaran penelitian.

LIT.0.1 Penyusunan Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
Naskah dinas yang berkenaan dengan kegiatan penelitian/RKpP.

LIT.1 PELAKSANAAN PENELITIAN

LIT.1.0 Ijin Penelitian
Naskah dinas yang berkenaan dengan ijin dari instansi mengenai waktu, lokasi, bantuan tenaga, sampai dengan pelaksanaan.

LIT.1.1 Data Mentah Hasil Penelitian
Naskah dinas yang berkenaan dengan data lapangan, hasil survey, kertas kerja penelitian, foto, peta lokasi.

LIT.1.2 Analisa Hasil Penelitian
Naskah dinas yang berkenaan dengan pengolahan data hasil penelitian.

LIT.1.3 Laporan Hasil Penelitian
Naskah dinas yang berkenaan dengan laporan hasil penelitian.

LIT.2 MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN

LIT.2.0 Monitoring Penelitian
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan rencana, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan hasil monitoring.

LIT.2.1 Evaluasi Penelitian
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan rencana, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan hasil evaluasi.

LIT.2.2 Rekomendasi
Naskah dinas yang berkenaan dengan hasil monitoring dan hasil evaluasi.

/LIT.3 DISEMINASI ...

LIT.3 DISEMINASI

LIT.3.0 Publikasi

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan sampai dengan penyebaran informasi hasil penelitian berupa *leaflet*, *booklet*, brosur, jurnal, info, warta, poster, dan lain-lain.

LIT.3.1 Gelar Teknologi/Seminar/Lokakarya

Naskah dinas yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan seminar sampai dengan *prosiding*.

LIT.3.2 Pameran

Naskah dinas yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan pameran sampai dengan *prosiding*.